
Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengembangan Sektor Pertanian Lokal di Desa Werot, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara

Dira Anggela Rampengan¹
Stefanus Sampe²
Neni Kumayas³

Email Korespondensi: diraanggelar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya dukungan logistik pertanian, khususnya ketersediaan pupuk, serta lemahnya fungsi pengawasan (controlling) terhadap pelaksanaan program pertanian desa. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya hasil dan keberlanjutan program pengembangan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat, khususnya petani yang terlibat langsung dalam program pertanian desa. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai pelaksanaan serta dampak kebijakan pertanian di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Werot dalam pengembangan sektor pertanian lokal tergolong cukup baik, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan administratif. Hal ini ditunjukkan melalui kejelasan tujuan program, proses perencanaan yang bersifat partisipatif, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, serta adanya upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. Aspek-aspek tersebut menjadi kekuatan utama pemerintah desa dalam mendorong pengembangan sektor pertanian lokal. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kelemahan. Kelemahan utama terletak pada kualitas dan kelengkapan bantuan pertanian, lemahnya pengendalian pasca-penyaluran bantuan, serta ketidakmampuan sebagian program pemberdayaan, seperti program pertanian cabai, untuk bertahan dalam jangka panjang. Akibatnya, efektivitas program belum sepenuhnya tercapai karena kinerja pemerintah desa masih lebih berfokus pada output berupa penyaluran bantuan, dan belum sepenuhnya berorientasi pada outcome dan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian desa.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Pengembangan Pertanian

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa Utara, memiliki potensi pertanian yang besar dengan komoditas unggul buah-buahan lokal sehingga kecamatan Likupang selatan yang termasuk desa werot di dalamnya masuk dalam kawasan Agrowisata Buah. Memiliki basis ekonomi agraris yang cukup kuat, Selain itu penetapan Likupang sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas oleh pemerintah pusat menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru.

Desa Werot yang terletak di Kecamatan Likupang Selatan memiliki sumber daya pertanian yang cukup besar berdasarkan data tahun 2024 desa werot dengan luas wilayah 1.500 Ha, lahan perkebunan 1.100 Ha, lahan ladang 340 Ha, lahan sawah 60 Ha, dengan potensi pertanian 75-80%. Komoditas unggulan berdasarkan luas tanam yaitu buah Durian, dan komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi yaitu buah Pisang. Adapun komoditas pangan seperti padi dan jagung serta perkebunan kelapa dan Holtikultur lainnya yang dapat menjadi modal utama dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat, karena berhubungan erat dengan ketersediaan dan kesinambungan pasokan pangan di tingkat lokal. Namun demikian, meskipun masyarakat desa telah menerima bantuan program berupa benih maupun bibit, praktik pengelolaan pertanian di wilayah ini belum berjalan optimal akibat keterbatasan logistik pendukung seperti pupuk, sarana, prasarana, dan peralatan modern. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya hasil

produksi serta belum maksimalnya pemanfaatan lahan yang tersedia. Oleh sebab itu, peran pemerintah desa dalam menyediakan infrastruktur pertanian dan memberikan pendampingan teknis secara berkesinambungan menjadi sangat penting agar Desa Werot dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi ketahanan pangan regional.

Keterlibatan pemerintah desa dalam mengembangkan sektor pertanian di Desa Werot memiliki hubungan langsung dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan. Dalam perspektif pembangunan lokal, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kecukupan produksi, melainkan juga menyangkut kebijakan, kelembagaan, serta bagaimana pemerintah desa mengelola sumber daya pertanian secara efektif. Ketahanan pangan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi pertanian yang ada, menyediakan sarana produksi yang memadai, dan memastikan sistem distribusi pangan berjalan dengan baik. Dengan demikian, ketahanan pangan bukan hanya persoalan produksi pertanian semata, melainkan bagian dari proses pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan kerja sama erat antara masyarakat, pemerintah, dan juga sektor swasta. Muncul pertanyaan mengenai sejauh mana desa dapat memanfaatkan kewenangan serta alokasi Dana Desa dalam menyusun kebijakan, melaksanakan berbagai program, dan memberdayakan para petani. Apakah upaya yang ditempuh sudah efektif dalam menghadapi tantangan sekaligus mengoptimalkan potensi yang ada di desa? Penelitian tentang 'kinerja Pemerintah Desa

dalam pengembangan sektor pertanian.

Oleh sebab itu, penelitian ini relevan dilakukan untuk menelaah sejauh mana kinerja Pemerintah Desa Werot dalam mengembangkan pertanian lokal, program-program apa saja yang telah dijalankan, serta faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Temuan penelitian diharapkan dapat menghadirkan gambaran yang menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pembangunan pertanian di tingkat desa, sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah desa dan pihak-pihak terkait dalam upaya memperkuat sektor pertanian.

Penelitian Terdahulu

1. Oroh, G. S. (2014). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa. Metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Peranan pemerintah desa dalam pembinaan. Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa dengan menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Peranan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan disektor pertanian maka kontribusi yang sangat besar dalam bidang pertanian adalah aktivitas usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada

masyarakat khususnya dibidang pertanian.

2. Hajra Ramli (2022). Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok Tani di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona ,Kabupaten Luwu Timur. Metode Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Peran pemerintah desa dianggap kurang maksimal dimana peran pemerintah sebagai regulator menunjukkan pemerintah desa tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan masyarakat petani akan tetapi pemerintah desa merealisasikan aturan dari pemerintah pusat, peran pemerintah desa sebagai dinamisator pendampingan dan pelatihan tidak merata diberikan kepada semua kelompok tani, dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator penyediaan bibit, pupuk serta sarana dan prasarana produksi yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani.
3. Raintung,A., Sambiran,S., &Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode Kualitatif. Hasil penelitian: peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa mobuya belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian oleh pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini Dilaksanakan Di Desa Werot, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Pemilihan Lokasi Ini Didasarkan Pada Potensi Besar Sektor Pertanian Lokal Di Desa Tersebut, Sehingga Relevan Untuk Dianalisis Dalam Kaitannya Dengan Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengembangannya Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Analisis data menjadi tahapan yang krusial dalam penelitian karena pada tahap inilah informasi yang diperoleh dari lapangan diproses, ditafsirkan, dan dikembangkan hingga menghasilkan temuan yang memiliki nilai ilmiah. Miles dan Huberman (1994:10) menegaskan bahwa analisis data kualitatif tidak berjalan secara lurus, melainkan berbentuk siklus yang saling berkaitan dan berlangsung terus-menerus. Siklus tersebut mencakup tiga kegiatan utama, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini sudah dimulai sejak data dikumpulkan dan terus berlanjut sampai penelitian berakhir

Pembahasan

1. Kejelasan Tujuan Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Werot telah memiliki kejelasan tujuan dalam pengembangan sektor pertanian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Target peningkatan hasil panen jagung dan padi serta tujuan jangka panjang berupa kemandirian pangan desa

menunjukkan adanya orientasi kinerja yang jelas dan terencana. Selain itu, program pertanian juga dinyatakan sebagai program prioritas utama desa dan diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang menekankan pemberdayaan masyarakat petani. Namun demikian, kejelasan tujuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pencapaian hasil yang optimal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa target produksi belum tercapai secara merata akibat faktor alam dan keterbatasan dukungan teknis. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan yang dirumuskan dengan kondisi implementasi di lapangan.

2. Standar Pelaksanaan Program dan Proses Implementasi

Dari sisi standar pelaksanaan, program pertanian di Desa Werot telah dijalankan melalui mekanisme perencanaan yang formal, partisipatif, dan sesuai regulasi, mulai dari musyawarah dusun, Musyawarah Desa (Musdes), hingga penetapan dalam RKPDes dan APBDes. Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki prosedur kerja yang jelas sebagai tolok ukur pelaksanaan program. Namun, temuan penelitian mengungkap bahwa standar pelaksanaan tersebut masih berorientasi pada penyaluran bantuan, khususnya bibit, dan belum sepenuhnya disertai dengan standar keberhasilan pasca-penyaluran. Contohnya, pada program bantuan bibit cabai, peneliti menemukan bahwa tingkat keberhasilan panen relatif rendah karena tidak disertai dengan bantuan pupuk dan pendampingan intensif, serta dipengaruhi oleh faktor alam. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelaksanaan program belum

mencakup aspek pengendalian dan keberlanjutan hasil.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Werot cukup menaruh perhatian pada penyediaan sarana dan prasarana fisik, terutama pembangunan dan perbaikan jalan perkebunan serta penyediaan irigasi. Infrastruktur ini diakui oleh aparatur desa dan masyarakat sebagai faktor pendukung penting bagi aktivitas pertanian, karena mempermudah akses menuju lahan dan distribusi hasil panen. Meskipun demikian, ketersediaan sarana pendukung non-fisik, seperti pupuk, alat pertanian, dan fasilitas pascapanen, masih terbatas. Masukan dari BPD dan petani menunjukkan bahwa bantuan seringkali hanya berupa bibit tanpa dilengkapi dengan input produksi lain yang sangat dibutuhkan. Hal ini menyebabkan sarana pendukung belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

4. Kompetensi Aparatur dan Kolaborasi

Dari aspek kompetensi aparatur, Pemerintah Desa Werot dinilai cukup mampu dalam menjalankan fungsi administrasi, pengelolaan anggaran, serta koordinasi dengan pihak eksternal, khususnya penyuluh pertanian. Kolaborasi antara pemerintah desa dan penyuluh berjalan relatif efektif, ditunjukkan oleh adanya pendampingan langsung kepada petani dan mulai terjadinya perubahan perilaku petani dalam penerapan teknik budidaya, seperti pemupukan dan pemanfaatan kembali lahan padi ladang. Namun, kompetensi aparatur desa dalam mengawal keberlanjutan program pemberdayaan masih menghadapi keterbatasan.

5. Mekanisme Umpan Balik, Evaluasi, dan Pengendalian

Penelitian menunjukkan bahwa secara formal, mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban telah tersedia dan berjalan. Pemerintah Desa Werot melaksanakan pelaporan melalui LKPPDes, menerima catatan evaluasi dari BPD, serta memfasilitasi Musdes sebagai sarana partisipasi dan umpan balik masyarakat. Transparansi anggaran juga ditunjukkan melalui pelaporan berkala dan pemasangan papan informasi. Namun, temuan lapangan mengungkap bahwa mekanisme pengendalian (controlling) terhadap keberhasilan program masih lemah. Program bantuan cabai, menunjukkan bahwa setelah penyaluran bantuan, pengawasan dan pendampingan tidak cukup kuat untuk memastikan keberlanjutan. Sehingga tujuan pemberdayaan jangka panjang tidak tercapai. Hal ini menegaskan bahwa evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbaikan program secara berkelanjutan.

Berdasarkan kelima dimensi kinerja menurut Wibowo (2016), kinerja Pemerintah Desa Werot dalam pengembangan sektor pertanian lokal dapat dikategorikan cukup baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan administratif, namun belum optimal pada tahap hasil dan keberlanjutan. Kejelasan tujuan, proses perencanaan partisipatif, pembangunan infrastruktur, serta transparansi dan akuntabilitas merupakan kekuatan utama pemerintah desa.

Sebaliknya, kelemahan utama terletak pada kualitas dan kelengkapan bantuan, lemahnya pengendalian pasca-penyaluran, serta ketidakmampuan sebagian program pemberdayaan (pertanian cabai) untuk bertahan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, efektivitas program belum sepenuhnya tercapai karena kinerja lebih berfokus pada output berupa penyaluran bantuan, dan belum sepenuhnya berorientasi pada outcome dan dampak berkelanjutan.

Penutup Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Desa Werot dalam pengembangan sektor pertanian lokal dapat dikategorikan cukup baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan administratif, namun belum optimal pada pencapaian hasil dan keberlanjutan program. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa masih lebih berorientasi pada output daripada outcome dan dampak jangka panjang

Saran

1. Terkait Kejelasan Tujuan Program

Pemerintah Desa Werot disarankan untuk menyelaraskan tujuan program pertanian dengan kondisi riil masyarakat dan lingkungan setempat, serta menetapkan target yang lebih realistis dan terukur agar dapat dicapai secara merata oleh seluruh penerima program.

2. Terkait Standar Pelaksanaan Program

Pemerintah desa perlu menyempurnakan standar pelaksanaan program dengan menambahkan indikator keberhasilan pasca-penyaluran bantuan, termasuk mekanisme pendampingan, pemeliharaan, dan keberlanjutan hasil, sehingga program tidak berhenti pada tahap distribusi bantuan semata.

3. Terkait Sarana dan Prasarana Pendukung

Disarankan agar bantuan pertanian tidak hanya difokuskan pada penyediaan bibit, tetapi juga dilengkapi dengan sarana pendukung lain seperti

pupuk, alat pertanian, serta dukungan pascapanen, guna meningkatkan produktivitas dan keberhasilan program secara berkelanjutan.

4. Terkait Kompetensi Aparatur dan Kolaborasi

Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan manajerial, serta memperkuat kerja sama dengan penyuluh pertanian dan instansi terkait agar pendampingan kepada petani dapat dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan.

5. Terkait Evaluasi dan Pengendalian Program

Mekanisme evaluasi perlu diperkuat dengan pengawasan yang lebih konsisten dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan program di masa mendatang. Dengan demikian, program pertanian desa dapat diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk mencapai tujuan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat petani..

Daftar Pustaka

Amani, S., Muhafidin, D., & Isnawaty, N. W. (2023). Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur (Nagari Guguk Tabek Sarjo,

Arham, A., et al. (2019). "Pengembangan Pertanian di Kawasan Desa." *Jurnal Agribisnis Indonesia*

Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Charles, D., et al. (2018). "The Role of Agriculture in Economic Growth." *Journal of Development Economics*.

- Creswell, J. W., & Poth, C.N.(2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Gibson, J.L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2003). *Organizations: Organizations: Behavior, structure, processes* (11th ed.). McGraw-Hill Irwin
- Hassibuan, M. S. P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat). *JANE- Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 632-640 Badan Pusat Statistik.2023. *Produk Domestik Bruto Indonesia menurut lapangan usaha*2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Koentjaraningrat.(1984). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lyas, T. (1999). *Kinerja*. Grasindo.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mosher, A. T. (1966). *Getting agriculture moving: Essentials for development and modernization*. New York: Frederick A. Praeger.
- Nasution, S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Ndraha, T.(2005). *Kybernologi: Sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oroh, G. S. (2014). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2).
- Organizations: Behavior, structure, processes (11th ed.). McGraw-Hill Irwin
- Ramli, H., Muhiddin, A., & Yusuf, M. (2024). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(4), 745-758
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Governance*, 1(2)
- Ruky, A. S. (2002). *Sistem Manajemen Kinerja*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Cetakan ke-34). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Strong, C. F. (1952). *Modern political constitutions: An introduction to the comparative study of their history and existing form* (Rev. ed.). London: Sidgwick & Jack
- Sugiyono.(2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surasih.(2002). *Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Thoha, M. (2003). Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya (Edisi 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Economic development (11th ed.). Boston: Pearson Addison Wesley.
- Wibowo. (2016). Manajemen kinerja (Edisi ke-5). Jakarta: Rajawali Pers
- Sumber Lain:
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- Dokumen Profile Desa Werot Kecamatan Likupang-Selatan. (2024). Data Umum